

**AGAMA DAN DEMOKRASI :
MUNCULNYA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI TUNISIA,
MESIR DAN LIBYA¹**

***RELIGION AND DEMOCRACY :
THE EMERGENCE OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN
TUNISIA, EGYPT AND LIBYA***

Muhammad Fakhry Ghafur

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

E-mail: fakhry_jamahiriyya@yahoo.com

Diterima: 2 Agustus 2014; direvisi: 6 September 2014; disetujui: 25 Oktober 2014

Abstract

Political Islam has a significant influence in the political dynamics in Tunisia, Egypt and Libya, especially after the Arab Spring phenomenon that began in Tunisia and broad impact on the political constellation in some Middle Eastern countries. In Tunisia, the effect of political Islam does not only appear at the elite, but also at the grass roots level with the emergence of mass-based Islamic political movement. While Egypt is a country where the growth of a variety of movements and transnational Islamic organizations. The post of Hosni Mubarak era bring to Islamic groups like the Muslim Brotherhood and the Salafis to participate more in the political arena. While in Libya, after the death of Qaddafi, the Islamic movements play an important role in the dynamics of Libyan politics, especially after the interim government declared Islamic law in Libya.

Keywords: Middle East, Islamic Politics, Tunisia, Egypt, Libya.

Abstrak

Politik Islam memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pasang surut pergolakan politik di Tunisia, Mesir dan Libya terutama pasca fenomena *Arab Spring* yang berawal di Tunisia dan berdampak luas terhadap konstelasi politik di sejumlah negara Timur Tengah. Di Tunisia, menguatnya pengaruh politik Islam tidak muncul dalam tataran elite politik saja tetapi juga dalam tataran *grass roots* dengan bermunculannya gerakan politik berbasis massa Islam. Sementara itu, Mesir adalah negara tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai gerakan dan organisasi Islam transnasional. Tumbanganya Husni Mubarak membawa angin segar bagi kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi untuk berperan lebih dalam kancah politik praktis. Sementara di Libya, pasca tewasnya Qaddafi, gerakan Islam memainkan peran penting dalam dinamika politik Libya, terutama setelah pemerintahan sementara mendeklarasikan hukum Islam di Libya.

Kata Kunci: Timur Tengah, Politik Islam, Tunisia, Mesir, Libya.

¹ Tim Peneliti terdiri dari: Muhammad Fakhry Ghofur, M. Hamdan Basyar, Dhuroruddin Mashad, Indriana Kartini, Zainuddin Djafar.

Pendahuluan

Gerakan protes yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah atau yang lebih dikenal dengan *Arab Spring* pada dasarnya merupakan panggilan untuk tegaknya demokrasi dan kebebasan.² Otoritarianisme dan ketidakadilan yang merebak luas telah mendorong gelombang protes di berbagai negara. Tunisia merupakan negara yang menjadi pelopor lahirnya gerakan protes yang menentang otoritarianisme dan ketidakadilan. Arab Spring di Tunisia bermula pada Desember 2010, ketika seorang pedagang buah bernama Boazizi melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan rezim yang berkuasa. Aksi protes yang dilakukan Boazizi pada akhirnya memicu amarah rakyat di seluruh santereo negeri yang kemudian menjelma menjadi gerakan revolusi menuntut mundurnya rezim Zainal Abidin Ben Ali. Lebih dari itu, aksi yang dilakukan Boazizi menginspirasi gerakan protes serupa di negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.

Memang, pada masa pemerintahan Zainal Abidin Ben Ali, sistem Pemilu multipartai sudah berlangsung di Tunisia, namun politik otoritarianisme tetap mencolok dalam setiap kebijakan rezim yang mendeskreditkan lawan politiknya. Misalnya pada tahun 1991, Ben Ali pernah melarang partai An-Nahdhah dan menangkap 265 anggotanya atas tuduhan kudeta.

Pasca tumbangnya Ben Ali, pemerintahan transisi yang dipimpin Perdana Menteri Caid Essebsi, berhasil melakukan berbagai program reformasi politik seperti pembebasan tahanan politik, mengadakan mantan pejabat partai dan keluarga Ben Ali yang terlibat kasus korupsi serta menyelenggarakan Pemilu. Pada Pemilu 2011 partai An-Nahdhah yang merupakan representatif dari Ikhwanul Muslimin berhasil mendominasi perolehan suara.

Beberapa bulan pasca pergolakan politik di Tunisia, protes rakyat serupa juga terjadi di Mesir. Pada 25 Januari 2011 terjadi demonstrasi massa yang berpusat di Tahrir Square. Protes rakyat yang terjadi tidak lepas dari kepemimpinan otoriter Husni Mubarak dalam menjalankan pemerintahan. Pada masanya, hak-hak politik

rakyat dan kebebasan pers dibatasi, partai politik dan kelompok oposisi diberangus. Selama beberapa dekade, gerakan Ikhwanul Muslimin kerap mendapatkan tekanan dan intimidasi dari pemerintahan Mubarak. Sistem otoritarianisme yang berlangsung di Mesir pada akhirnya mendorong aksi protes rakyat yang memaksa presiden Husni Mubarak turun dari jabatannya.

Pasca lengsernya Husni Mubarak, pemerintah transisi dikendalikan oleh *Supreme Council of The Armed Forces* (SCAF). Berbagai kebijakan politik telah dilakukan pemerintah transisi, diantaranya melaksanakan Pemilu parlemen dalam tiga tahap yang dilaksanakan pada November 2011 sampai awal Januari 2012. Pada Pemilu Parlemen, partai-partai Islam memperoleh suara mayoritas mengungguli partai nasionalis-sekuler. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) berhasil memperoleh 235 kursi atau 47,18 persen. Partai An-Nur dari kelompok Salafi memperoleh 121 kursi. Sedangkan partai Al-Wafd yang berhaluan nasionalis-sekular memperoleh 38 kursi. Sementara partai aliansi Mesir meraih 34 kursi.³ Pada Juni 2012 pemerintah transisi menyelenggarakan Pemilu Presiden. Mohamad Mursi dari FJP berhasil memenangkan Pilpres yang diselenggarakan dalam dua putaran tersebut. Transisi demokrasi yang tengah berlangsung ditandai dengan kudeta militer yang memaksa presiden Mursi turun dari jabatannya.

Gelombang demokratisasi yang berlangsung di Tunisia dan Mesir berdampak pada perubahan iklim politik di beberapa negara termasuk Libya. Gerakan perlawanan yang berbasis di Benghazi berhasil menguasai asset pemerintahan penting dan memaksa pasukan milisi pro Qaddafi keluar dari Tripoli. Pada 21 Oktober 2011 pasukan oposisi yang didukung NATO dapat melumpuhkan Qaddafi di Sirte.

Tewasnya Qaddafi membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik. Di bawah Dewan Transisi Nasional (NTC), Libya memasuki era baru dengan membentuk konstitusi baru dan mengadakan Pemilu Parlemen. Pada Juli 2012, diselenggarakan Pemilu Parlemen

² Nazeer Ahmad, "The 2011 Arab Revolution", www.thehistoryofislam.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2013.

³ Maria Cristina Paciello, "Egypt : Changes and Challenges of Political Transition," Medpro Technical Paper, *Social Science Research Network*, Rochester, New York, No. 4, Mei 2011.

pertama dengan jumlah partai peserta Pemilu sebanyak 160 partai. Diantara partai yang lahir pasca Qaddafi adalah partai *National Forces Alliances* (NFA) yang dipimpin Mahmoud Jibril. Sementara partai-partai Islam diwakili *Justice and Development Party* (JDP) yang merupakan representasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin Libya yang didirikan pada tahun 1942⁴ dan partai Al Wathan pimpinan Abdul Hakim Belhaj. Dalam Pemilu 2012, partai NFA berhasil memperoleh suara mayoritas dengan 39 kursi disusul *Justice and Development Party* (JDP) dengan 17 kursi dan *National Front Party* dengan 2 kursi. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu di Libya kemudian diikuti oleh Pemilihan Presiden Libya. Majelis Umum Nasional telah memilih dua orang Presiden, antara lain, Mustafa Abu Shagur yang kemudian dicopot karena gagal dalam menentukan kabinet, dan Ali Zaidan yang juga dirundung berbagai persoalan ekonomi, politik dan keamanan di Libya. Pada November 2012, Majelis Umum Nasional menetapkan kabinet yang dibentuk Ali Zaidan. Kendati demikian, pemerintahan baru tidak lepas dari berbagai persoalan domestik karena adanya penolakan dan serangan dari milisi bersenjata dan kabilah.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi di tiga negara kasus, dapat dijelaskan bahwa proses transisi demokrasi di masing-masing negara berbeda satu dengan lainnya. Tunisia merupakan negara yang dengan mudah dapat melalui proses transisi, sementara Mesir dan Libya meskipun proses transisi telah berlangsung, tetapi masih terdapat persoalan yang terjadi dengan munculnya berbagai konflik antar kekuatan politik.

Sepanjang sejarahnya, Tunisia, Mesir dan Libya telah bereksperimen dengan sistem politik dan ekonomi masing-masing. Di bawah kepemimpinan para rezim, ketiga negara menjalankan kebijakan politik dan ekonomi masing-masing. Namun, krisis finansial yang melanda seiring semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran serta kegagalan elite dalam membentuk identitas nasionalis rakyat telah menciptakan krisis politik yang berdampak luas.

⁴ *Ibid*, www.iai.it/pdf/mediterraneo/.../MedPro-technical-paper_04.pdf, diakses pada tanggal 2 Januari 2013.

Tabel 1. Kinerja Pemerintah di Sejumlah Negara Timur Tengah

Region, Country or Country Grouping	Civil Liberties 1 (most) to 10	Political Right 1 (strongest) to 10	Corruption Perception 1 to 10 (least corrupt)	Rule of Law -2.5 to 2.5 (best)	Human Development Index
Middle East	5.1	5.6	2.9	-0.3	0.73
Arab League	5.4	6.1	2.8	-0.6	0.70
Iran	6.0	6.0	1.8	-0.8	0.78
Turkey	3.0	3.0	4.4	0.1	0.81
Africa Union	4.1	4.2	2.6	-0.8	0.49

Sumber: Freedom House, “*Freedom in the World Report*”, 2008, <http://freedomhouse.org>.

Tabel 1. memberikan gambaran akan tingkat kinerja pemerintahan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara sebelum terjadinya *Arab Spring*. Berdasarkan hasil survei Freedom House yang dirilis pada tahun 2008, menunjukkan bahwa telah terjadi kemunduran terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil di sejumlah kawasan yang tercermin dalam seperlima negara-negara di dunia, dimana paling menonjol adalah di negara jajahan bekas Uni Soviet, Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam survei tersebut sejumlah negara mengalami penurunan dalam kebebasan termasuk Mesir. Menurut Freedom House, Mesir adalah salah satu contoh negara yang mengimplementasikan konsolidasi demokrasi dengan cara kekerasan terhadap kelompok oposisi, masyarakat sipil, dan media independen.⁵

Fenomena lain yang berkembang pasca *Arab Spring* adalah munculnya kekuatan politik Islam di beberapa negara Timur Tengah. Bagi sebagian kalangan, politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara “agama dan politik”, atau dalam terminologi Islam modern disebut sebagai kolaborasi antara *din wa daulah* (agama dan negara).⁶ Dalam beberapa literatur baik yang ditulis oleh ilmuwan Muslim maupun nonMuslim, bahwa politik Islam merupakan cara pandang Islam secara universal dalam urusan berbangsa dan bernegara. Dr. Schacht, bahwa Islam lebih dari sekedar agama, tetapi juga mencerminkan terori perundang-undangan dan politik. Singkatnya bahwa Islam merupakan

⁵ Lihat, *Freedom in the World Report 2008*, <https://freedomhouse.org>, diakses pada tanggal Februari 2013.

⁶ Sayyid Qutb, *Ma'alim fi Ath Thariq*, (Kairo: Daar Asy Syaruq, 1973).

sebuah sistem yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.⁷ Sementara itu, menurut Taqiyuddin An-Nabhani, Politik dipandang sebagai pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri yang dilaksanakan oleh negara dan umat (rakyat), negara secara langsung mengatur urusan kenegaraan, sedangkan umat mengawasi negara.⁸

Dewasa ini, semangat untuk membumikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin marak seiring dengan berlangsungnya demokratisasi pasca tergulingnya rezim otoritarianisme di beberapa negara Timur Tengah. Kebangkitan politik Islam atau revivalisme politik Islam dalam pandangan Bubalo memiliki beberapa bentuk diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik. Sementara Dekmeijan memandang bahwa revivalisme politik Islam ditandai dengan menguatnya aktivitas keagamaan yang meliputi munculnya partai-partai politik, kelompok-kelompok pergerakan dalam masyarakat Islam. Para pemikir Islam seperti Hasan Al-Banna, Al-Maududi, Sayyid Qutb, Khomeini, Muhammad Baqi Sadr, Said Hawa dan lainnya banyak memberikan landasan ideologi pemikiran politik Islam kontemporer. Olivier Roy memandang bahwa politik Islam adalah gaya baru dari sebuah gerakan Islam yang modern yang memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan prototipe masyarakat Islam yang sebenarnya.⁹ Senada dengan Roy, Mohammed Ayoob memandang bahwa Islam bukan sekedar agama tetapi juga sebagai sebuah ideologi politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep Islamis di ranah publik.¹⁰ Penggunaan konsep politik Islam pada akhirnya sering dikaitkan dengan

Islamisme yang menganggap bahwa Islam bukan sekedar agama tetapi juga ideologi, nilai, dan doktrin yang memberikan pondasi bagi gerakan sosial. Karenanya, menurut Denoux politik Islam merupakan hasil dari instrumentalisasi ideologi, nilai dan doktrin Islam dalam sebuah organisasi gerakan Islam untuk mencapai tujuan politik sebagai respons terhadap tantangan dan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam.¹¹

Dalam realitas politik Timur Tengah saat ini, politik Islam seolah menjadi kekuatan baru yang tidak terbantahkan lagi terutama pasca terjadinya *Arab Spring*. Menguatnya pengaruh politik Islam di Timur Tengah khususnya di tiga negara kasus menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji terutama ditengah menguatnya tuntutan terhadap demokrasi itu sendiri. Tulisan ini akan mengkaji sejauh mana politik Islam dapat menjadi sebuah kekuatan baru dalam realitas politik di tiga negara kasus, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap munculnya kekuatan politik Islam di tiga negara kasus dan bagaimana korelasinya dengan perkembangan demokrasi di Timur Tengah.

Dinamika Politik Di Tunisia, Mesir dan Libya Pra *Arab Spring*

Peristiwa yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah pada penghujung tahun 2010 telah membuka lembaran baru dalam dinamika politik di kawasan tersebut. Gejolak politik yang dimulai di Tunisia kemudian menyebar ke berbagai negara lainnya seperti Libya, Mesir dan Suriah yang saat ini masih bergejolak. Otoritarianisme dan perilaku korupsi yang menggejala di berbagai lini telah memicu terjadinya gerakan protes yang dimotori oleh kaum muda. Selain itu, pasca runtuhnya Uni Soviet, negara-negara pro-demokrasi di Timur Tengah, seperti AS dan negara-negara Uni Eropa berusaha untuk memperkuat cengkramannya di seluruh kawasan Timur Tengah yang kaya minyak melalui slogan “demokratisasi”. Peristiwa di sejumlah negara Timur Tengah dengan latar belakang *Arab Spring* pun dipandang oleh dunia internasional sebagai titik tolak gerakan kebangkitan demokrasi di negara-negara Arab.

⁷ C.E. Bosworth, Van Donzel, W.P. Heinrichs, G. Lecomte (Eds.), *Encyclopedia of Islam Vol. IV*, (Leiden: Brill, 1997), hlm. 350.

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Daar al-Ummah, 2002), hlm. 11-13.

⁹ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1994), hlm. vii-xi.

¹⁰ Mohammed Ayoob, *The Many Faces of Political Islam, Religion and Politics in the Muslim World*, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008), hlm. 2.

¹¹ Guilain Denoex, “The Forgotten Swamp : Navigating Political Islam”, *Middle East Policy*, Vol. IX, No. 2, 2002.

Gerakan perubahan yang dimotori oleh kaum muda tersebut sejatinya tidak hanya terjadi di Tunisia, tetapi menjalar ke negara-negara lainnya. Di Mesir, gerakan perubahan disebut sebagian kalangan sebagai “Revolusi Tahrir” yaitu sebuah gerakan yang menghendaki perubahan dan menolak sistem otoriter, korup dan diskriminatif terhadap suatu golongan atau disebut juga sebagai “*Facebook Revolution*” dimana seorang pemuda bernama Wael Ghanim melalui media sosial dapat menjadi inspiratif bagi para demonstrans yang menuntut terjadinya perubahan di Mesir.¹² Kendati demikian, revolusi kaum muda tersebut pada akhirnya harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik yang sudah lebih dahulu eksis, seperti partai-partai maupun kelompok pergerakan Islam. Di Libya misalnya, gerakan perubahan tidak mampu menandingi ideologi sosialisme yang dibangun Muammar Qaddafi dan peran partai *National Forces Alliance* (NFA). Sepanjang dinamika sejarah politik di Timur Tengah, gerakan-gerakan oposisi kerap mendapat tekanan dari rezim yang berkuasa sehingga hanya menjadi gerakan *underground* sampai terjadinya gerakan perubahan yang terjadi di Tunisia.

Dinamika Politik Tunisia Pra Arab Spring

Sebelum terjadinya *Arab Spring*, Tunisia merupakan negara sekuler yang menganut sistem demokrasi *electoral*, dimana presiden dipilih melalui mekanisme Pemilu dengan masa jabatan selama 5 tahun. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, Zainal Abidin Ben Ali kerap terpilih sebagai presiden. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan partai *Constitutional Democratic Party* yang menguasai lebih dari 80% kursi di Parlemen. Sepanjang masa pemerintahannya, Ben Ali kerap bersikap represif terhadap lawan politiknya. Meskipun gerakan dan aktivitas kelompok oposisi dapat berkembang, namun mendapat pengawasan ketat dari pemerintahan rezim. Hal ini mengakibatkan lemahnya partisipasi publik dalam dinamika sosial-politik di Tunisia.

Kemudian setelah terjadinya demokratisasi, beberapa partai politik mulai bermunculan.

Terdapat sedikitnya empat partai yang mendominasi peta politik, diantaranya, An-Nahdhah, *The Congress for the Republic*, Ettakatol dan *Modernist Democratic Pole and Democratic Progressive Party*. Partai An-Nahdhah menjadi partai populer dan mendominasi mayoritas suara. *Congress for the Republic Party* (CPR) berada pada posisi kedua dengan 30 kursi. Kemudian An-Nahdhah, CPR dan Ettakatol membangun koalisi dengan masing-masing jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Mustafa Ben Jafar dari Ettakatol menjadi Ketua Badan Legislatif, pemimpin CPR menjadi Presiden Interim dan Hamadi Jebali menjadi Perdana Menteri.¹³ Dominasi An-Nahdhah dalam Pemilu di Tunisia tidak lepas dari peran tokoh-tokohnya yang dianggap dapat membawa perubahan. Disamping itu, rakyat sudah jenuh dengan kebijakan politik rezim yang sangat otoriter dan mengedepankan tindakan kekerasan.

Kuatnya pemerintahan Ben Ali, tidak dapat dipisahkan dari peran militer dalam menjaga kekuasaan selama dua dekade. Sebelum terjadinya *Arab Spring* gerakan demonstrasi kerap berhadapan dengan militer Tunisia yang menggunakan kekerasan. Dari sini kita dapat melihat bahwa militer berperan penting dalam menjaga kekuasaan dari perlawanan kelompok oposisi.

Dinamika Politik Mesir Pra Arab Spring

Sama halnya dengan Tunisia, rezim yang berkuasa di Mesir pada umumnya mendapat dukungan dari militer dan didukung negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) yang sangat berkepentingan dengan eksistensi kepemimpinan Mesir dibawah kendali militer. Dengan dominasi militer diharapkan dapat melanggengkan kepentingan AS dan negara-negara Barat baik sosial-politik dan ekonomi di Timur Tengah.

Sejarah berkuasanya rezim militer di Mesir bermula pada tahun 1952, ketika Gamal Abdel Nasser berhasil mengambil alih kekuasaan dari Raja Farouk. Sejak saat itu, peta kekuatan politik Mesir kerap dikuasai oleh kalangan

¹² Apriadi Tambukara, “*Revolusi Timur Tengah: Keruntuhan Para Penguasa Otoriter*”, (Yogyakarta: Narasi, 2011).

¹³ Alexis Arieff, “Political Transition in Tunisia”, www.crs.gov RS21666, 16 Desember 2011.

militer. Di bawah kendali militer, Mesir menjadi negara sekuler. Kendati demikian, kebijakan pemerintahan Mesir memiliki corak yang berbeda dari satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Pada masa pemerintahan Gamal Abdel Nasser, Mesir menerapkan sistem politik sosialis yang lebih cenderung ke “kiri”. Sementara di bawah pemerintahan Anwar Sadat, Mesir tetap didominasi militer dengan kebijakan pemerintahan sekuler yang cenderung “kanan”. Pasca tewasnya Anwar Sadat pada tahun 1981, Mesir dipimpin oleh Hosni Mubarak, seorang mantan Komandan Angkatan Udara. Hosni Mubarak dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter yang keras terhadap lawan politiknya. Banyak para aktivis dari gerakan Islam dan kelompok oposisi yang ditahan dan dibunuh.

Pada masa Mubarak, militer mempunyai kedudukan khusus dalam pemerintahan. Partai Nasional Demokrat menjadi partai yang berkuasa sejak Mubarak memimpin. Hal itu tidak lepas dari peran militer yang selalu mendukung kebijakan Mubarak. Dewan Agung Militer (*Supreme Council of the Armed Forces – SCAF*) didirikan dan memiliki keistimewaan dalam kancah politik Mesir. Selain militer, unsur lain yang berpengaruh dalam politik Mesir adalah kelompok sekular-liberal. Gerakan “Tamarrud” yang menentang pemerintahan presiden Mursi pada 30 Juni 2013 merupakan gerakan yang dimotori oleh kelompok tersebut.

Selain itu, di Mesir terdapat juga kelompok Islam yang mulai tampak pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Pasca lengsernya Hosni Mubarak, kelompok Islam mulai terjun dalam kancah politik praktis, seperti Ikhwanul Muslimin yang membentuk *Freedom and Justice Party* (FJP) dan kelompok Salafi yang mendirikan partai An-Nur.

Dinamika politik Islam di Mesir mulai nampak, ketika terjadi liberalisasi politik dan ekonomi pada tahun 1970, banyak diantara para aktivis yang menggunakan simbol-simbol keislaman sebagai sarana dalam kegiatan mereka. Sejak saat itu Islamisasi mulai tumbuh dengan berbagai bentuknya baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam ranah sosial. Disamping itu, pendidikan agama juga tumbuh pesat dalam empat dekade terakhir, Universitas Al-Azhar merupakan salah satu universitas Islam terbesar

dengan jumlah 400.000 mahasiswa yang tersebar di berbagai jurusan.

Dalam dinamika politik, Mesir bermunculan sejumlah gerakan politik yang menggunakan simbol-simbol dan agenda politik Islam. Salah satu gerakan yang kerap menyerukan penerapan hukum Islam di Mesir adalah Ikhwanul Muslimin. Sejak didirikan pada tahun 1928, IM berubah menjadi gerakan Islam terbesar di Mesir dengan basis pendukung kelas menengah perkotaan terdidik. Kuatnya IM tidak lepas dari lima prinsip yang menjadi landasan ideologi gerakan, seperti Al-Urubah (Arabisme), Wathaniyyah (Patriotisme), Qaumiyyah (Nasionalisme) dan Alamiyyah (internasionalisme).¹⁴

Dinamika Politik Libya Pra Arab Spring

Sejarah dinamika politik Libya kontemporer dapat dirunut sejak masa Muammar Qaddafi (1969-2011). Sejak saat itu peran dan sepak terjang Qaddafi telah mengubah iklim politik Libya secara signifikan. Pasca kudeta terhadap raja Idris pada 1 September 1969, Qaddafi membentuk sistem politiknya sendiri. Misalnya, Uni Sosialis Arab dan konsep negara “Al-Jamahiriyah Al-Arabiyyah ASy-Sya’biyyah Al-Libiyyah Al-Isytirakiyyah Al-Uzhma”. Untuk mempertahankan kekuasaannya dibentuk Dewan Komando Revolusi yang dipimpin Qaddafi dengan sebagian besar anggotanya adalah militer. Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Qaddafi membentuk dewan menteri yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Pemimpin Revolusi. Pada Januari 1970, Qaddafi menghapus konstitusi 1951 dan menggantinya dengan konstitusi yang terdapat dalam *Kitab Akhdar* (Kitab Hijau). Dalam kitab Akhdar disebutkan bahwa *Al-Qaid* dalam hal ini Qaddafi adalah Pemimpin Besar Revolusi dan menjadikan Islam sebagai sumber hukum “Al-Islam Huwa Syariatul Mujtama’”.¹⁵ Dari sini dapat dilihat bahwa militer melalui Dewan

¹⁴ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2012).

¹⁵ Muammar Qaddafi, *Kitabul Akhdhar*, (Tripoli: Al-Markaz Al-‘Alami Li Abhats Wa Ad-Dirasat Kitab Al-Akhdhar, 1977).

Komando Revolusi berperan penting dalam penyusunan kebijakan dan konstitusi negara.

Selama hampir empat dekade, aktivitas politik yang dibentuk mampu berfungsi dan berjalan dengan baik, terlebih dengan dukungan dana hasil penjualan minyak. Meski demikian, kondisi politik dan ekonomi Libya sempat menurun seiring dengan meningkatnya tekanan politik global dan memburuknya hubungan Libya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Kekacauan politik dan ekonomi di Libya memuncak pasca terjadinya aksi demonstrasi Massa di Benghazi pada awal 2011 yang menuntut mundurnya Muammar Qaddafi. Gerakan protes yang dimotori oleh kelompok Islam pada akhirnya berhasil memaksa Qaddafi keluar dari persembunyiannya sampai akhirnya tewas di tangan kelompok oposisi pada Oktober 2012.

Pasca tewasnya Qaddafi, aktivitas politik publik mulai berjalan dengan berdirinya partai-partai politik baik sekular-liberal, nasionalis maupun Islam. *National Forces Alliance* (NFA) yang berhaluan nasionalis-liberal menjadi pemenang Pemilu pertama pasca Qaddafi disusul *Justice and Development Party* yang merupakan representasi dari kelompok Ikhwanul Muslimin Libya.

Tidak seperti halnya di Tunisia dan Mesir, partai Islam tidak menjadi kekuatan populer, meskipun selama beberapa dekade kelompok Islam menjadi kelompok yang menentang rezim Qaddafi. Terdapat perbedaan mendasar antara partai Islam di Tunisia maupun Mesir dengan partai Islam di Libya. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat institusional dan interaksi dengan masyarakat. Selama masa kepemimpinan Qaddafi, kelompok Islam tidak dapat membangun dukungan lokal karena tidak dapat mengembangkan struktur organisasi dan institusinya disamping sangat ketat konstitusi yang diberlakukan terhadap partai Islam. Selain itu, tidak adanya koalisi yang menyatukan partai-partai Islam sehingga partai-partai Islam yang muncul dalam Pemilu adalah partai-partai kecil yang memiliki tujuan dan agenda politik masing-masing. Sebagian rakyat Libya masih memandang bahwa kelompok Islam memiliki masa lalu yang erat dengan peristiwa kekerasan

dan terror, seperti pada tahun 1990 antara kelompok milisi bersenjata dengan pasukan Qaddafi.

Disamping kekurangan secara substantif dari kelompok Islam, kekalahan partai Islam disebabkan oleh kuatnya pengaruh politik kelompok liberal. Hal tersebut dikarenakan figur kelompok liberal yang memiliki kredibilitas dibanding tokoh lainnya. Mahmoud Jibril adalah salah satu tokoh *National Forces Alliance* yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kancah politik Libya terutama pasca era Qaddafi. Karenanya tidak mengherankan jika pada Pemilu 2012, Jibril berhasil merangkul berbagai kalangan termasuk kelompok minoritas dan para aktivis lembaga swadaya masyarakat yang pro terhadap demokratisasi di Libya.

Berdasarkan pengalaman sejarah dinamika politik di tiga negara, yakni Tunisia, Mesir dan Libya dapat disimpulkan bahwa kendati berbagai lapisan masyarakat mulai dari tingkat *grassroot* sampai elite dapat menikmati aktivitas politik masing-masing, namun militer dan rezim otoriter yang berkuasa tetap mempunyai peran yang signifikan dalam kancah politik. Dominasi militer dan kuatnya pengaruh rezim, masih mewarnai dinamika politik dan menjadi ciri utama dari sejarah di tiga negara tersebut sebelum terjadinya *Arab Spring*. Hal ini juga berpengaruh terhadap eksistensi kelompok Islam yang turut serta dalam pertarungan politik namun tidak demikian dominan pada suatu sistem politik di tiga negara tersebut bahkan terjadi perpecahan serta behadapan dengan berbagai pihak yang mempunyai pengaruh dalam pandangannya terhadap kelompok Islam.

Demokrasi dan Kebangkitan Politik Islam di Tunisia

Musim semi bagi demokratisasi di Timur Tengah atau yang lebih dikenal dengan *Arab Spring* berawal di Tunisia pada Desember 2010. Pergolakan politik di Tunisia dilatarbelakangi oleh aksi bakar diri seorang pedagang buah, Mohamed Bouazizi sebagai aksi protes terhadap sikap represif dan ketidakadilan rezim Zainal Abidin Ben Ali. Siapapun tidak akan menyangka bahwa aksi tersebut memicu terjadinya gerakan protes serupa di negara-negara lainnya di Timur

Tengah. Tekanan sosial, politik dan ekonomi yang dirasakan rakyat Tunisia selama tiga dekade lebih telah mendorong lahirnya “Revolusi Jasmine”.

Tunisia merupakan negara sekuler yang dipimpin oleh rezim otoriter melalui kebijakan yang melarang berdirinya partai oposisi dan gerakan Islam dengan dasar pemisahan agama dan politik. Pada masa pemerintahan Ben Ali, para aktivis kerap mendapat tekanan dari tentara rezim, bahkan sebagian diantaranya diasingkan seperti Rashid Al Gannushi, salah seorang pemimpin terkemuka partai An-Nahdhah.

Sementara pada sektor ekonomi, meskipun selama satu dekade terakhir dapat meningkat, tetapi kesenjangan sosial menjadi pemandangan umum di Tunisia, bahkan angka pengangguran di tahun 2011 semakin meningkat. Ketidakstabilan sistem ekonomi di Tunisia tidak lepas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat dan keluarga rezim. Puncak dari ketidakstabilan sosial, politik dan ekonomi di Tunisia terjadi pada akhir tahun 2010 ketika terjadi gerakan protes yang menuntut mundurnya rezim Ben Ali dari kursi kekuasaannya. Pada 14 Januari 2011, Ben Ali semakin kehilangan dukungan dari pejabat, rakyat dan militer sehingga mendorongnya untuk mengasingkan diri ke Saudi Arabia. Pengasingan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Ben Ali yang telah memerintah selama 23 tahun.

Pasca mundurnya Ben Ali, Tunisia memasuki babak baru dalam dinamika politik. Pemerintah transisi membentuk Dewan Transisi untuk menyusun regulasi penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu tersebut merupakan langkah awal dalam demokratisasi Tunisia. Hal tersebut dikarenakan banyak dari *civil society* dan perwakilan partai yang turut serta dalam Pemilu. Pada era transisi, *Ben Achour Commission*, suatu badan pembentuk konsensus di Tunisia dibentuk. Komisi ini bertujuan untuk membangun konsolidasi demokrasi serta menyusun konstitusi Pemilu.

Pada Oktober 2012, diselenggarakan Pemilu legislatif untuk memilih 217 anggota parlemen yang bertugas membentuk konstitusi dan pemerintahan baru. Hasil akhir Pemilu menunjukkan partai An-Nahdhah memperoleh 89 kursi diikuti oleh *Congress for the Republic* (CPR) dengan 29 kursi. Di parlemen, partai

pemenang Pemilu, An-Nahdhah berkoalisi dengan partai CPR dan Ettakatol. Beberapa petinggi partai koalisi berhasil menempati posisi penting dalam pemerintahan. Hamadi Jebali dari partai An-Nahdhah menjadi Perdana Menteri, Moncef Marzouki pemimpin CPR menjadi presiden dan Mustapha Ben Jafar sebagai Ketua Badan Legislatif.¹⁶ Pasca Pemilu, Majelis Konstituante Nasional mulai menyusun draf konstitusi, dimana salah satu poin yang diusulkan adalah pemberlakuan syariat Islam di Tunisia. Perjuangan An-Nahdhah dalam mengusung syariat Islam mengisyaratkan bahwa konsep yang diusung An-Nahdhah tidak jauh berbeda dengan *Justice and Development Party* (AKP) di Turki. Namun, peran An-Nahdhah dalam membentuk negara tidak seluruhnya berjalan mulus. Hal tersebut dikarenakan An-Nahdhah berkoalisi dengan dua partai lain yakni CPR dan Ettakatol yang tidak mengusung syariat Islam.

Kemenangan partai Islam An-Nahdhah di Tunisia tidak lepas dari beberapa faktor, diantaranya bahwa konsep yang dibawa An-Nahdhah berlawanan dengan rezim Ben Ali. Para anggotanya merupakan bagian dari kelompok oposisi yang tidak pernah terlibat dalam struktur pemerintahan rezim Ben Ali. Selain itu An-Nahdhah tidak hanya mempromosikan nilai-nilai Islam semata tetapi juga mengusung identitas nasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Disamping itu, basis dukungan An-Nahdhah adalah masyarakat kelas menengah yang tersebar di berbagai daerah di Tunisia. Kemenangan partai An-Nahdhah di Tunisia tersebut menjadi perhatian tidak hanya dari kalangan Islam tetapi juga bagi kalangan sekular-nasionalis. Bagi kalangan Islam, kemenangan An-Nahdhah merupakan fenomena baru sepanjang sejarah politik Tunisia, karena kelompok Islam dapat memimpin sekaligus berkoalisi dengan partai lainnya di parlemen. Sementara kalangan sekuler memandang dengan penuh kekhawatiran dengan kebangkitan partai Islam di Tunisia.

Kekhawatiran sebagian kalangan terhadap kebangkitan politik Islam di Tunisia mulai muncul pasca Pemilu. Pada 28 September 2014, pemerintah pimpinan koalisi An-Nahdhah menyatakan akan mundur akibat kekacauan

¹⁶ Arieff, *op.cit.*

politik yang terjadi. Tuntutan peralihan kekuasaan tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu toleran terhadap gerakan Islam radikal. Terbunuhnya dua orang tokoh oposisi menandakan semakin maraknya radikalisme di Tunisia dalam dua tahun terakhir pasca Pemilu. Selain itu, pemerintah dianggap telah gagal dalam mengawal transisi demokrasi di Tunisia. Belajar dari pengalaman Ikhwanul Muslimin di Mesir, pada akhir September 2013, An-Nahdhah menyatakan bersedia untuk mundur dari pemerintahan. Mundurnya An-Nahdhah dari pemerintahan setelah pihak AS, pejabat pemerintahan Tunisia serta kelompok oposisi melakukan pertemuan untuk membahas jalan tengah dari pergolakan politik yang terjadi. Memang, dinamika politik yang terjadi di Tunisia tidak lepas dari berbagai kekuatan politik, termasuk AS sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingannya di Tunisia. Bagi kelompok neo konservatif AS misalnya, kebijakan AS dalam mendukung rezim di Timur Tengah adalah sebagai bagian untuk menekan kelompok Islam dalam mendirikan negara fundamentalis yang dapat mengancam kepentingan Barat dan keamanan internasional.

Demokrasi dan Kekuatan Politik Islam di Mesir

Mesir merupakan salah satu negara yang terkena dampak fenomena *Arab Spring*. Sejak gerakan protes muncul menentang rezim Husni Mubarak, politik Mesir mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada Februari 2011, Husni Mubarak yang telah memerintah selama tiga dekade mundur dari jabatannya. Mundurnya Husni Mubarak membuka lembaran baru dalam kehidupan sosial-politik Mesir.

Pada masa Husni Mubarak, berbagai macam gerakan dan partai politik bermunculan di Mesir. Diantara kekuatan politik yang memiliki peran dalam perpolitikan Mesir adalah Militer. Pada masa Husni Mubarak, dibentuk Dewan Agung Militer (*Supreme Council of The Armed Forces – SCAF*). SCAF mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam pemerintahan.

Selain itu, terdapat kelompok liberal-sekular yang mempunyai basis kalangan menengah atas dan terpelajar. Kelompok ini mempunyai

pengaruh yang cukup signifikan dalam dinamika politik Mesir. Beberapa tokoh kelompok ini menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Mesir merupakan tempat berkembangnya berbagai gerakan dan organisasi Islam. Pasca tumbanganya Husni Mubarak, kelompok Islam mulai berperan dalam kancah politik praktis, Ikhwanul Muslimin misalnya, mendirikan *Justice and Development Party (JDP)* dan mendapat suara yang cukup signifikan dalam Pemilu Parlemen, Sementara kelompok Salafi mendirikan partai An-Nur serta Al-Azhar sebuah institusi yang sangat sentral dalam hubungan agama dan negara.¹⁷

Kekuatan politik Islam mulai muncul sekitar tahun 1970 pada masa kekuasaan Presiden Anwar Sadat. Liberalisasi politik dan ekonomi yang berkembang menyebabkan semakin dinamisnya wacana Islam dalam kehidupan rakyat Mesir. Terdapat beberapa kelompok yang berusaha untuk menerapkan syariah Islam baik dalam individu maupun dalam kehidupan sosial-politik dan ekonomi. Meskipun demikian, kelompok Islam memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi berbagai isu seperti masalah kewarganegaraan, hak asasi manusia dan masalah-masalah sosial. Bangkitnya kekuatan politik Islam di Mesir memicu kekhawatiran di kalangan liberal-sekuler. Kalangan ini memandang, bahwa kebangkitan Islam akan membatasi kebebasan dalam kehidupan rakyat Mesir yang sudah tertera dalam konstitusi Mesir.

Kekuatan Islam di Mesir mulai muncul pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Liberalisasi politik dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai gerakan dan organisasi keagamaan. Islamisasi di Mesir sendiri, tidak terbatas pada sosial-politik semata, tetapi juga dalam lingkungan aparatur negara. Hal itu dapat dilihat dari sikap pemerintah yang lebih menekankan hukum, bahasa dan simbol keagamaan sebagai cara untuk melegitimasi kewenangannya. Presiden Anwar Sadat merupakan pemimpin yang kerap mendorong munculnya gerakan dan organisasi keagamaan. Pada tahun 1980,

¹⁷ Nathan J. Brown, *Islam and Politics in the New Egypt*, (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, April 2013).

Anwar Sadat menetapkan hukum Islam sebagai sumber konstitusi Mesir. Islamisasi negara dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan semakin kuat pada masa pemerintahan Husni Mubarak.

Pada masa kepemimpinan Husni Mubarak, simbol-simbol keagamaan kerap digunakan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Islamisasi aparatur negara pun terjadi dalam ranah peradilan agama Mesir. Perkembangan Islamisasi dalam beberapa dekade terakhir memunculkan kekhawatiran pada kalangan liberal-sekular yang menganggap kebangkitan Islam sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan kewarganegaraan yang tertera dalam konstitusi Mesir. Kekuatan politik Islam, seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi yang mendominasi kancah politik Mesir dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan demokrasi Mesir. Alhasil, dinamika politik Mesir kerap diwarnai oleh perebutan pengaruh dan persaingan terbuka antara kalangan Islam dengan sekular-liberal yang semakin mengerucut dalam beberapa dekade terakhir.

Pasca Husni Mubarak, kelompok Islam mulai berpartisipasi dalam kancah politik. Kelompok ini mulai menggunakan kekuatan politik untuk membangun masyarakat yang lebih religius. Pada Pemilu Parlemen 2012, Ikhwanul Muslimin melalui *Justice and Development Party* berhasil mendominasi perolehan suara, disusul oleh partai An-Nur yang merupakan representasi dari kelompok Salafiyah. Selain itu, institusi yang berperan dalam politik Mesir adalah Al Azhar. Institusi ini memiliki peran penting dalam kehidupan rakyat Mesir, terutama dalam menetapkan hukum syariah di tengah masyarakat Mesir. Dengan demikian, kelompok Islam di Mesir tidaklah homogen, tetapi memiliki sikap dan pandangan yang berbeda terutama dalam menyikapi berbagai isu, seperti kewarganegaraan, hak asasi manusia, masalah sosial dan jender.

Kalangan konservatif menolak isu-isu kontemporer tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sementara kalangan lain, seperti Al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin memandang bahwa nilai-nilai demokrasi penting untuk ditegakkan sepanjang tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Sedangkan kalangan

post-Islamis yang terdiri dari para intelektual independen menganggap bahwa prinsip-prinsip demokrasi sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian juga dengan pandangan terkait korelasi antara agama, politik dan ekonomi kalangan Islam saling berbeda pendapat antara satu dengan lainnya.

Berkaca dari dinamika yang terjadi dalam realitas politik Mesir, aktor Islam dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya, aktor Islam resmi, aktor sosial, aktor politik dan aktor intelektual. Aktor Islam resmi merupakan bagian dari aparatur negara atau kelompok yang diminta pendapatnya untuk kemaslahatan bersama, seperti Al-Azhar, Kementerian Wakaf, Daarul Ifta', serta Komite Agama, Sosial dan Wakaf di Parlemen. Aktor sosial mencakup kelompok atau organisasi yang banyak melakukan aktivitas sosial dan keagamaan, termasuk pengajian, penerbitan dan penyediaan layanan sosial. Aktor politik merupakan aktor yang berpartisipasi langsung dalam politik praktis, termasuk dalam kelompok ini adalah Ikhwanul Muslimin, partai Al-Wasat dan beberapa organisasi militan seperti Al-Jama'ah Al-Islamiyyah dan gerakan Al-Jihad. Sedangkan aktor intelektual lebih pada upaya memberikan kontribusi bagi dunia pemikiran dan isu-sisu kontemporer dengan merujuk pada sumber ajaran Islam.¹⁸

Pergulatan antar aktor dan kekuatan politik di Mesir terlihat pasca tumbanganya presiden Husni Mubarak dengan munculnya kelompok Islam sebagai pemenang Pemilu 2012. Pada 3 Juli 2013 militer berhasil melakukan kudeta terhadap presiden Mohammad Mursi, atas dukungan militer kelompok sekuler dapat mengalahkan kelompok Islam dan menguasai pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tumbanganya rezim Husni Mubarak tidak serta merta mengakhiri kekuatan militer, bahkan semakin kuat setelah Dewan Agung Militer (*Supreme Council of The Armed Forces/SCAF*) berhasil melakukan beberapa kali amandemen pada konstitusi Mesir. Kendati demikian, atas desakan internasional, militer dengan terpaksa memberikan peluang kepada elite politik Mesir

¹⁸ Netherlands-Flemish Institute in Cairo dan Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies, *Mapping Islamic Actors in Egypt*, (Cairo: Netherlands-Flemish Institute dan Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies, 2012).

untuk bersaing dalam kancah politik. Terdapat beberapa kali Pemilu yang diselenggarakan, antara lain, Pemilu Parlemen yang dilanjutkan dengan Pemilu Presiden.

Pada Pemilu Parlemen yang diselenggarakan dalam tiga tahap untuk memilih 498 anggota Parlemen, Aliansi Demokratik untuk Mesir yang dipimpin oleh Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) berhasil mendominasi kursi di Parlemen dengan 225 kursi, sementara aliansi partai Islam yang dipimpin partai An-Nur memperoleh 125 kursi.¹⁹ Kemenangan kelompok Islam dalam Pemilu Parlemen memicu kekhawatiran dari kalangan militer dan sekular-liberal, sehingga mereka berusaha untuk mencari peluang untuk merebut kekuasaan yang telah dikuasai oleh kelompok Islam. Hal itu dapat dilihat setelah militer melalui SCAF membubarkan parlemen yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak sampai disitu, SCAF mengeluarkan dekrit pada 17 Juni 2012 yang memberikan kekuasaan kepada militer. Melalui dekrit tersebut SCAF dapat mengangkat Dewan Konstituante baru yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Pembubaran parlemen melalui Dekrit tersebut mendorong presiden Mohammad Mursi mengeluarkan dekrit untuk memulihkan anggota parlemen yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 12 Agustus 2012, presiden Mursi mengeluarkan dekrit untuk membatalkan kekuasaan legislative SCAF. Kemudian pada 22 November 2012, Mursi kembali mengeluarkan dekrit untuk mempertahankan Dewan Konstituante dan memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada presiden Mursi. Dekrit yang dikeluarkan terakhir ini pada akhirnya mendorong terjadinya demonstrasi massa yang menuntut dicabutnya dekrit. Untuk mempertahankan draf konstitusi yang telah ditetapkan oleh Dewan Konstituante, presiden Mursi memutuskan untuk mengadakan referendum terhadap draf konstitusi tersebut yang pada akhirnya rakyat Mesir mendukung draf konstitusi tersebut.

Referendum yang telah dilaksanakan secara sah tidak serta merta menyurutkan kelompok oposisi untuk melakukan protes, bahkan gerakan

protes semakin meningkat yang mendorong pihak militer mengeluarkan ultimatum yang ditolak presiden Mursi. Sampai akhirnya, militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 3 Juli 2013. Pasca kudeta militer, kondisi politik semakin tidak stabil. Militer berusaha untuk mendeskreditkan Ikhwanul Muslimin dari kancah politik Mesir yang berakibat semakin meningkatnya perseteruan antara kubu yang bersengketa. Banyak dari kalangan para tokoh dan aktivis Ikhwanul Muslimin ditangkap dan dibunuh dengan tuduhan telah melakukan provokasi terhadap rakyat untuk melawan pemerintah. Di pemerintahan, umat Islam tidak memperoleh kursi dalam komite 50 yang dibentuk pemerintahan Adliy Mansour untuk mengubah paksa konstitusi Mesir hasil referendum 2012. Rentetan peristiwa tersebut pada akhirnya semakin menyudutkan kalangan umat Islam dalam kancah politik Mesir.

Melihat situasi yang tidak menentu, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menuntut rezim Husni Mubarak yang berkuasa untuk melakukan langkah-langkah perubahan guna mempercepat transisi politik di Mesir. Bahkan AS telah mengutus Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton sebagai upaya mendukung proses transisi politik di Mesir. Hal itu berbeda ketika terjadi kudeta militer, AS tidak langsung mengecam peralihan kekuasaan tersebut yang mengakibatkan kekecewaan dari masyarakat Mesir sendiri. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan terkait orientasi politik AS di Mesir dan Libya. Di Mesir, AS akan terus mendukung rezim penguasa baik sipil maupun militer selama tidak menghambat kepentingannya di Timur Tengah. Siapa pun yang berkuasa di Mesir baik melalui kudeta maupun dengan cara demokratis, AS akan mendukung termasuk dengan kudeta yang dilakukan Abdul Fattah As-Sisi terhadap presiden terpilih Mohammad Mursi. Hal ini dapat dilihat juga dengan yang terjadi di Libya ketika terjadi pemberontakan rakyat terhadap rezim Qaddafi, AS dan negara-negara Barat langsung menjadi pendukung utama dalam operasi militer untuk menjatuhkan rezim Qaddafi.

¹⁹ "Egypt Elections 2011", <http://www.elections2011.eg/index.php/results>, diakses pada tanggal 2 Februari 2013.

Demokratisasi dan Kebangkitan Politik Islam di Libya

Libya merupakan salah satu negara di Afrika Utara yang terimbas badai *Arab Spring*. Seperti halnya yang terjadi di Mesir maupun Tunisia, rezim yang telah berkuasa selama kurang lebih 42 tahun harus menerima berbagai perlawanan dari pasukan pro-perubahan. Munculnya perlawanan dari rakyat tidak lepas dari beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Sistem politik otoriter dan tidak adanya regenerasi kepemimpinannya selama lebih dari empat dekade telah memicu semakin meluasnya gerakan protes rakyat.

Pada masa pemerintahan Qaddafi, sistem politik dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan. Melalui Kitab Akhdar, Qaddafi menetapkan kekuasaan yang hampir tak terbatas. Partai politik, gerakan oposisi dan media massa diberangus keberadaannya. Banyak diantara para aktivis dan tokoh oposisi ditangkap dan dibunuh. Gerakan protes yang terjadi di negara-negara Timur Tengah mendorong gerakan protes serupa di Libya menuntut perubahan kepemimpinan. Gerakan protes yang terjadi di berbagai santero negeri pada akhirnya memaksa rezim Qaddafi mengakhiri kekuasaannya di tempat kelahirannya di Sirte pada 20 Oktober 2011. Runtuhnya rezim Qaddafi tidak lepas dari intervensi asing di Libya. Sejak awal²⁰ meletusnya konflik, PBB membentuk *United Nation Support Mission in Libya* (UNSMIL) yang bertugas mempercepat penyelesaian konflik di Libya. Sementara itu, NATO melakukan berbagai serangan militer untuk melemahkan basis kekuatan Qaddafi.

Tewasnya Qaddafi membuka lembaran baru dalam dinamika politik Libya. *National Transition Council* (NTC) yang didukung PBB mempercepat proses transisi politik dengan melaksanakan Pemilu dan pembentukan konstitusi baru. Pada tanggal 7 Juli 2012, NTC menyelenggarakan Pemilu sekaligus momentum penyerahan kekuasaan dari NTC ke *General People Congress* (GNC). Terbentuknya GNC menjadi langkah awal dalam proses transisi di Libya sekaligus menjadi ajang pertarungan berbagai kekuatan politik dalam memperebutkan pengaruhnya. Terdapat beberapa kekuatan partai politik yang bersaing dalam pemilu Parlemen.

²⁰ Tambukara, *op.cit.*

Pertama, partai Islam yang diwakili dua partai besar yaitu *Justice and Development Party* (JDP) yang merupakan representasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin Libya serta partai AL-Wathan yang didirikan oleh mantan komandan *The Libya Islamic Fighting Group* (LIFG) serta mendapat dukungan dari kelompok Salafi. Sementara partai politik berhaluan nasionalis-sekular terdiri dari partai *National Forces Alliance* (NFA) yang dipimpin Mahmoud Jibril, *National Centrist Party* didirikan oleh Ali Tarhouni serta partai *National Front Party* yang didirikan Muhammad Yusuf Al Magharif seorang mantan duta besar India pada era Qaddafi.

Pada Pemilu parlemen 2012, partai *National Forces Alliance* (NFA) berhasil memperoleh suara mayoritas dengan 39 kursi mengungguli partai Islam seperti JDP yang memperoleh 17 kursi, sedangkan partai Al-Wathan yang didukung Salafi hanya memperoleh 3,45 persen suara.²¹ Pasca Pemilu 2012, GNC terbentuk di bawah pimpinan Mohammed Al-Magharif. Kemudian pada tanggal 12 September 2013, GNC menyelenggarakan pemilihan Perdana Menteri. Mustafa Abu Shagur yang merupakan calon kuat dari koalisi partai Islam berhasil memperoleh 96 suara mengungguli kandidat dari NFA yang memperoleh 94 suara. Namun, pada Oktober 2012, Abu Shagur mengundurkan diri setelah mendapat mosi tidak percaya dari mayoritas anggota Parlemen dan digantikan Ali Zaidan. Pengangkatan Ali Zaidan sebagai Perdana Menteri membawa harapan baru bagi demokratisasi di Libya ditengah konflik akut yang melanda Libya pasca runtuhnya kekuasaan rezim Qaddafi.

Kebangkitan Politik Islam di Libya

Pasca penyelenggaraan Pemilu 2012, semangat untuk menegakkan syariah Islam muncul dalam kehidupan politik di Libya. Dalam beberapa kesempatan tokoh gerakan reformasi Libya, Mahmoud Jibril kerap menekankan dukungannya terhadap penerapan syariat Islam. Bersama dengan tokoh lainnya seperti Mustafa Abdul Jalil, Jibril mendeklarasikan syariat Islam sebagai sumber hukum di Libya, sebagaimana

²¹ "Libya Election 2012", www.hnec.ly, diakses pada tanggal 4 Januari 2013.

yang tertera dalam konstitusi baru, bahwa Libya merupakan negara yang berdaulat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Agama resmi negara adalah Islam dengan syariat Islam sebagai sumber hukum negara. Bahasa Arab adalah bahasa nasional Libya.²² Penetapan syariat Islam sebagai sumber hukum di Libya menunjukkan akan semangat mengembalikan Islam dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi Libya.

Sementara itu, koalisi partai Islam di Parlemen semakin kuat dibawah pimpinan *Justice and Development Party (JDP)*. JDP mampu merangkul kelompok lainnya yang terdiri dari para ulama, perwakilan kabilah, pengusaha, akademisi dan masyarakat kelas menengah. Kursi dari kalangan nonpartai merupakan suara yang diperhitungkan, berhubung sekitar 80% kursi merupakan tokoh Islam melalui jalur independen. Dengan kata lain, kelompok Islam di parlemen telah menguasai 80% suara mengungguli partai NFA yang memperoleh 70% suara. Karenanya, tidak mengherankan jika kelompok Islam dapat berperan penting dalam menyuarakan aspirasinya terutama yang berkaitan dengan undang-undang yang berlandaskan syariat Islam. Sebagai contoh misalnya penetapan sistem perbankan Syariah dan Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang keduanya menjadi dasar tegaknya komunitas Islam di Libya.

Disamping berperan di parlemen, kelompok Islam juga berperan penting dalam perjuangan melawan rezim Qaddafi melalui berbagai gerakan. Gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Al Qaeda adalah gerakan Islam yang memiliki basis dukungan besar di beberapa kota seperti Sabha dan Benghazi. Dalam konteks politik Libya, gerakan Islam terdiri dari beberapa kelompok, diantaranya Ikhwanul Muslimin Libya yang didirikan pada tahun 1949 oleh sekelompok alumni mahasiswa universitas Al-Azhar, Mesir.²³ Karenanya tidak mengherankan jika IM Libya mampu menggerakkan kaum pelajar dalam

gerakan perlawanan melawan rezim Qaddafi sebagaimana yang terjadi di Mesir.

Sejak berkuasanya Qaddafi, IM Libya kerap mendapatkan intimidasi dari tentara rezim. Banyak dari tokoh dan aktivisnya yang dipenjara dan dibunuh. Pada tahun 1976 gerakan ini resmi dilarang di Libya, tetapi pada 1986 muncul kembali dalam melakukan serangan terhadap rezim. Kemudian seiring dengan fenomena Arab Spring yang menerjang negara-negara Timur Tengah, gerakan ini membentuk *Justice and Development Party* sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita politiknya.

Gerakan lain yang juga berpengaruh adalah *Libya Islamic Fighting Group (LIFG)* yang didirikan pada tahun 1990 oleh sekelompok pejuang Al Qaeda Libya. Tujuan utama gerakan ini adalah menjatuhkan pemerintahan Qaddafi dan mereformasi sistem politik di Libya. Untuk lebih berperan dalam kancah politik praktis, pasca Qaddafi, gerakan ini berubah nama menjadi Al Harakah Al Islamiyyah Al Libiyyah min Ajli Taghyir (*The Libyan Islamic Movement for Change*).²⁴

Terakhir adalah gerakan Salafiyyah yang mempunyai latar belakang dan sejarah yang cukup lama di Libya. Gerakan ini mulai muncul dalam dinamika politik Libya pada tahun 1960 yang mempunyai visi menegakkan ajaran Islam terdahulu. Dalam perjalanannya kelompok Salafiyyah mulai terjun dalam politik praktis dengan bergabung dalam berbagai partai politik Islam di Libya.

Bangkitnya kelompok Islam dalam kancah politik Libya pasca Qaddafi menimbulkan kekhawatiran dari kubu nasionalis-sekular dan kelompok milisi bersenjata pro Qaddafi yang masih eksis di beberapa wilayah. Oleh karena itu, tidak heran jika pasca Qaddafi berbagai kelompok dan kekuatan politik saling serang memperebutkan kekuasaan. Konflik antara kubu Islamis yang mendominasi GNC dan militer serta gerakan milisi bersenjata di berbagai daerah. Militer yang dipimpin Khalifa Haftar bermaksud membubarkan GNC dan membentuk pemerintahan sementara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.

²² "Draft Constitutional Charter for the Transitional Stage", <http://www.al-bab.com/arab/docs/libya/Libya-Draft-Constitutional-Charter-for-the-transitional-stage.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

²³ Umar 'Asyur, "Daurul Islam fi Bina Daulah ma Ba'da Tsaurah", www.rcssmideast.org/reviews/, diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

²⁴ *Ibid.*

Militer menganggap GNC telah gagal dalam menjalankan pemerintahan dan mencederai revolusi, sementara kelompok Islam yang dipimpin Anshar Asy-Syariah menganggap militer akan melakukan kudeta. Perseteruan antara militer dan GNC serta terjadinya perang sipil antar etnis di beberapa wilayah menunjukkan semakin kompleksnya konflik Libya ditengah menggeliatnya aktivitas politik Islam.

Penutup

Arab Spring yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah dinilai sebagai panggilan bagi tegaknya kebebasan di Timur Tengah dengan munculnya beberapa fenomena penting yang saling terkait satu dengan yang lain, diantaranya, demokratisasi, runtuhnya rezim otoriter dan munculnya kekuatan politik Islam. Demokratisasi yang terjadi di sejumlah negara telah mengakibatkan tumbanganya sebagian rezim otoriter seperti Zainal Abidin Ben Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir dan Muammar Qaddafi di Libya. Peristiwa tumbanganya rezim di kawasan sebenarnya bukan kali pertama terjadi, jauh sebelum terjadinya Arab Spring, pada tahun 1979 kaum Mullah dibawah pimpinan Ayatullah Khomaeni berhasil menumbangkan penguasa Iran, Reza Pahlevi. Kemudian pada tahun 2003, rezim Saddam Hussein berhasil ditumbangkan melalui intervensi militer AS di Iraq.

Runtuhnya para rezim otoriter di sejumlah negara Timur Tengah tidak lepas dari sistem politik yang berkembang di negara-negara itu. Demokrasi yang berkembang di dunia saat ini saja misalnya tidak bisa begitu saja diimplementasikan dengan mudah di berbagai negara. Demokrasi kerap berbenturan dengan struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama yang berkembang di suatu negara.

Dalam kasus Tunisia, rezim Ben Ali secara formal menerapkan sistem politik multi partai, tetapi secara substansi mendukung partai *Rassemblement Constituonnel Democratique* (RCD). Terbukti selama tiga kali pemilu (1994, 1999 dan 2004) RCD mendominasi perolehan suara, bahkan dalam Pemilu 2004 RCD unggul dengan 94,48 persen. Disamping itu, berbagai kekuatan politik yang mengancam kekuasaan rezim dilarang. Pada tahun 1994 Ben Ali

melarang partai An Nahdhah dan menangkap para tokoh dan aktivisnya. Ketidakstabilan sosial, politik dan ekonomi di Tunisia memuncak pada akhir 2010, ketika seorang pedagang buah bernama Mohamed Bouazizi melakukan aksi bakar diri menentang pemerintahan rezim yang disusul gerakan protes besar-besaran di seluruh wilayah Tunisia.

Di Mesir, gelombang protes terjadi menentang pemerintahan rezim Husni Mubarak yang dinilai lamban menangani berbagai persoalan ekonomi negara. Sistem otoriter yang dibangun sejak 1981 telah menyebabkan semakin meningkatnya gerakan protes rakyat. Pada saat itu *National Democratic Party* (NDP) menjadi kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Alhasil, selama beberapa kali penyelenggaraan Pilpres (1993, 1999 dan 2005) Mubarak selalu memperoleh suara mayoritas. Hal itu tidak lepas dari pembatasan terhadap aktivitas partai dan gerakan oposisi seperti partai Ghad, Kifayyah, Ikhwanul Muslimin dan Salafiyah. Penentangan terhadap rezim semakin memuncak seiring dengan gerakan protes yang terjadi di Tunisia. Pasca gerakan protes yang berpusat di Tahrir Square, Husni Mubarak yang telah berkuasa selama 23 tahun akhirnya tumbang.

Sementara di Libya, rezim Muammar Qaddafi yang tengah berkuasa selama kurang lebih 42 tahun harus menerima perlawanan dari rakyatnya akibat sistem politik otoriter yang dikembangkannya. Berbagai gerakan perlawanan berbasis massa Islam, seperti IM Libya, LIFG dan Anshar Asy Syariah menjadi pelopor dalam pertempuran melawan militer loyalis Qaddafi. Sampai pada akhirnya Qaddafi tewas di kampong halamannya di Sirte pada 21 Oktober 2011. Tewasnya Qaddafi tersebut tidak lepas dari intervensi militer NATO selama konflik melawan Qaddafi berlangsung. Tewasnya Qaddafi menandakan dimulainya era baru Libya.

Sejalan dengan tuntutan demokratisasi dan runtuhnya rezim otoriter, muncul fenomena menarik lainnya yang terjadi dalam dinamika politik Timur Tengah saat ini yaitu kemenangan politik Islam.

Di tiga negara kasus, kelompok Islam senantiasa mendapat intimidasi dan tindakan

kekerasan dari rezim penguasa. Di Mesir misalnya, meskipun Ikhwanul Muslimin dapat bermain dalam kancah politik melalui jalur independen, tetapi gerakan ini dianggap sebagai organisasi ilegal. Kendati demikian, para tokohnya senantiasa menggelorakan semangat juang sehingga IM senantiasa mendapat simpati rakyat. Runtuhnya Husni Mubarak memberikan angin segar terhadap IM untuk tampil mendominasi kancah politik Mesir. Melalui Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP), IM berhasil menguasai Parlemen dan berhasil mengusung tokohnya Mohammad Mursi sebagai presiden terpilih. Kendati pada akhirnya demokrasi yang tengah berlangsung dengan aman dan damai tersebut harus dikotori oleh peristiwa kudeta militer yang dipimpin Jenderal Abdul Fattah As-Sisi.

Sementara di Tunisia, politik Islam dapat bangkit setelah selama beberapa dekade mendapat perlakuan diskriminasi dari rezim Zainal Abidin Ben Ali. Hal itu tidak lepas dari keterbukaan yang tengah bergelora di Tunisia. Pasca runtuhnya Ben Ali, Tunisia berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip negara demokrasi. Salah satu langkah penting adalah membentuk pemerintahan demokratis, representatif dan akuntabel melalui mekanisme Pemilu. Momen penting itu ternyata berhasil mendongkrak elektabilitas partai Islam. Partai An-Nahdhah yang berbasis massa Islam berhasil memperoleh suara terbanyak dengan 89 kursi dari 217 kursi parlemen.

Berbeda dengan Tunisia dan Mesir, partai Islam di Libya tampil sebagai kekuatan kedua di bawah partai nasionalis-liberal. Kekuatan politik nasionalis-liberal diwakili oleh tiga kekuatan. Pertama, *National Forces Alliance* (NFA) yang dipimpin Mahmoud Jibril dan mendapat dukungan dari organisasi massa, LSM, dan para tokoh nasional Libya. Kedua, *National Centris Party* (NCP) yang didirikan oleh Ali Tarhouni seorang mantan perdana menteri pada era Mahmoud Jibril. Ketiga, *National Front Party* (NFP) yang didirikan oleh Al Magharif mantan duta besar pada masa Qaddafi. Dalam Pemilu yang diselenggarakan pada bulan Juli 2012, NFA memperoleh suara mayoritas dengan 39 kursi melebihi partai Islam JDP yang hanya memperoleh 17 kursi diikuti oleh NFP dengan 2 kursi. Hasil pemilu tersebut memperlihatkan

bahwa kekuatan nasionalis-liberal melampaui kekuatan Islam hampir tiga kali lipat. Meskipun demikian, munculnya partai JDP sebagai partai politik berbasis massa Islam mempresentasikan kekuatan politik Islam yang luar biasa sejak masa era Qaddafi.

Pengalaman munculnya kekuatan politik Islam dalam transisi demokrasi di Tunisia, Mesir, dan Libya dengan segala plus minusnya telah terbukti menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan serupa di sejumlah negara Timur Tengah, seperti Suriah, Yaman, dan Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi telah memberikan ruang bagi kekuatan politik Islam untuk menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan utama, sehingga wajar kiranya *The Economist* (April 2011) memandang bahwa Islam menjadi pendorong kebangkitan di dunia Arab.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Banna, Hasan. 2012. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Ad-Daulah Al-Islamiyyah*. Beirut: Daar al-Ummah.
- Ayoob, Mohammed. 2008. *The Many Faces of Political Islam, Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: The Univesity of Michigan Press.
- Brown, Nathan J. 2013. *Islam and Politics in the New Egypt*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Qutb, Sayyid. 1973. *Ma'alim fi Ath Thariq*. Kairo: Daar Asy Syaruq.
- Qaddafi, Muammar. 1976. *Kitabul Akhdhar*. Tripoli: Al-Markaz Al-'Alami Li Abhats Wa Ad-Dirasat Kitab Al-Akhdhar.
- Roy, Olivier. 1994. *The Failure of Political Islam*. Massachussets: Harvard University Press.
- Tambukara, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah, Keruntuhan Para Penguasa Otoriter*. Yogyakarta: Narasi.

Jurnal

- Denoeux, Guilain. 2002. "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam". *Middle East Policy* IX(2).

Paciello, Maria Cristina. 2011. "Tunisia, : Changes and Challenges of Political Transition". *Medro Technical Report* No. 3.

Surat Kabar dan Website

Arief, Alexis. 2011. "*Political Transition in Tunisia*". www.crs.gov RS21666.

'Asyur, Umar. 2013. "*Daurul Islam fi Bina Daulah ma Ba'da Tsaurah*," www.rcssmideast.org/reviews.

Netherlands-Flemish Institute in Cairo dan Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies. 2012. "*Mapping Islamic Actors in Egypt*". <http://www.elections2011.eg/index.php/results>

http://www.iai.it/pdf/mediterraneo/medpro/medpro-technical-paper_03.pdf.

----- 2011. "Egypt : Changes and Challenges of Political Transition". www.iai.it/pdf/mediterraneo/.../MedPro-technical-paper_04.pdf.